



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK PEMBICARAAN
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 20 Agustus 2015
W a k t u	: Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Paripurna – Nusantara II Lt. 3 Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, MM : Wakil Ketua DPR RI Didampingi 1. Drs. Setya Novanto : Ketua DPR RI 2. H. Fadli Zon, SS., M.Sc : Wakil Ketua DPR RI 3. Fahri Hamzah, S.E. : Wakil Ketua DPR RI
A c a r a	: Pemandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya (Didahului dengan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI).
Sekretaris Rapat	: Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si. : Sekjen DPR RI Didampingi 1. Drs. Helmizar Kepala Biro Persidangan 2. Dr. Dewi Barliana S, M.Psi. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan 3. Dra. Mitra Anindyarina. Kepala Bagian Persidangan Paripurna
Hadir Anggota	: 420 Dari 555 orang Anggota

A. Pendahuluan

1. Rapat dibuka Pukul 10.45 WIB dipimpin Oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak **Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, MM**, dihadiri oleh 420 Orang dari 555 Orang Anggota DPR RI.
2. Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pada hari ini adalah:
Pemandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota keuangannya.
3. Rapat Paripurna didahului dengan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI Saudara **Drs. H.M. Dardiansyah**, menggantikan Saudara **H. Adriansyah**, dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II.
4. Rapat Paripurna menerima 3 (tiga) pucuk surat yaitu:
 - 1) Surat dari Presiden dengan Nomor R-48/Pres/08/2015 tertanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pertimbangan Bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Negara Sahabat Untuk Republik Indonesia.
 - 2) Surat dari Presiden dengan Nomor R-49/Pres/08/2015 tertanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pertimbangan Bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Negara Sahabat Untuk Republik Indonesia.
 - 3) Surat dari Ketua DPD RI dengan Nomor HM.310/5854/DPD RI/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2015, Perihal Penyampaian Keputusan DPD RI.

Selanjutnya untuk surat-surat tersebut sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

5. Untuk penetapan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan, sesuai dengan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Pasal 23 dan Pasal 55 dan sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Oktober 2014 dan tanggal 18 November 2014. Sepanjang tidak ada perubahan dan usulan baru maka penetapan sebelumnya dinyatakan tetap dapat digunakan sambil menunggu kelengkapan usulan lebih lanjut dari masing-masing Fraksi. Sedangkan untuk penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan akan di koordinasikan lebih lanjut oleh Pimpinan DPR sesuai koordinator bidang masing-masing.

B. Keputusan dan Kesimpulan

1. Rapat Paripurna mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota keuangannya.
Khusus untuk Fraksi F.PPP, telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi secara tertulis kepada Pimpinan DPR RI, sesuai dengan usulan dan masukan dari Pimpinan Fraksi F.PPP dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paripurna ini.

2. Rapat Paripurna menyetujui tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi Atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016, akan disampaikan dalam **Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015**

C. Penutup

Rapat ditutup Pukul 13.15 WIB

Jakarta, 20 Agustus 2015

KETUA RAPAT



Dr. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, MM

47

**Interupsi Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke – 3
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016
Selasa, 25 Agustus 2015**

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
<p>Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si A-19/F-P NasDem/DAPIL: JATIM IV</p>	<p>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</p> <p>Ingin menyampaikan satu hal didalam Paripurna ini berkaitan dengan sebuah hal yang dibicarakan sekarang ini dimasyarakat, yaitu dengan sebuah kasus yang menyangkut sebuah perusahaan sekuritas namanya adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia diduga perusahaan ini melakukan sebuah tindak pidana yang hingga merugikan negara kurang lebih 240 milyar, karena itu memang harus diusut oleh Kejaksaan Agung. Ya alhamdulillah Kejaksaan mengusut ini, ditengah pengusutan tersebut tiba-tiba Jaksa Agung dipanggil oleh Pimpinan DPR, disini menjadi persoalan. Kami ingin mempertanyakan kenapa Jaksa Agung dipanggil oleh Pimpinan DPR, karena masyarakat menuduh bahwa DPR telah melakukan intervensi, padahal kami sebagai Anggota kami tidak tahu menahu dengan persoalan ini. Karena itulah menurut saya ini harus ada penjelasan, kalau perlu Mahkamah Dewan ini harus bertindak terhadap Pimpinan DPR ini untuk mengikuti sehingga melakukan klarifikasi terhadap ini.</p> <p>Pertama, kenapa ini dipanggil secara mendadak ditengah pengusutan dan kemudian bersikap sangat tertutup dan rahasia, tertutup tentu saja karena ini adalah yang hadir beberapa orang. Sangat rahasia kami juga tidak tahu apa yang dibicarakan disana, kalau memang ada hal-hal yang salah yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap perusahaan sekuritas ini. Itu pengadilan nanti yang akan menentukan, ada pra peradilan dan sebagainya. Itu tidak bisa ditengah jalan kemudian Pimpinan DPR mengintervensi, ini harus menjelaskan kepada rakyat, menurut saya. Kenapa diintervensi ditengah jalan dan kami tidak bertanggungjawab terhadap yang dilakukan oleh Pimpinan Dewan ini, menurut kami Pimpinan DPR <i>offside</i> dalam hal ini dan tidak boleh dilakukan lagi hal seperti ini, dan kami menyerukan kepada Kejaksaan Agung, perusahaan ini terus dilakukan jangan berhenti <i>whatever will be, will be</i> apapun yang terjadi kata shakespeare itu terjadilah belakangan. Tetapi ini harus tuntas kami sangat khawatir ditengah jalan Kejaksaan Agung menghentikan, kalau ini dihentikan sangat berbahaya karena tuduhan masyarakat itu benar DPR</p>	<p>KETUA RAPAT :</p> <p>Terima kasih tadi interupsinya, tetapi secara sekilas perlu kami sampaikan bahwa sesegera mungkin Pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan seluruh Pimpinan Fraksi. Perlu kami sampaikan dari awal tidak ada niatan apapun dari Pimpinan DPR terkait dengan hal tersebut, kecuali tetap <i>law enforcement</i> harus kita tegakkan. Yang kedua sesuai dengan data yang kami miliki dari Sekretariat Jenderal sudah mengundang seluruh Pimpinan Komisi III sehingga kebetulan saja pada saat itu Komisi III yang hadir Saudara Azis Syamsuddin dan Saudara Desmond, saya sendiri ada kepentingan tidak bisa hadir tetapi dengan kondisi yang sudah disepakati dalam akhir rapat, insyaallah Pimpinan DPR akan mengundang seluruh Pimpinan Fraksi, tidak ada yang ditutup-tutupi.</p>

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	telah melakukan intervensi karena itu mohon klarifikasi hal tersebut nanti kepada rakyat Indonesia. Demikian dari saya Wassalamua'alaikum Wr.Wb.	
AKBAR FAIZAL A-33/F-P NasDem/DAPII: SULSEL II	<p>Terima kasih Pimpinan,</p> <p>Hari ini hampir tidak ada orang yang tidak membicarakan tentang angka 14.000 lebih sedikit sekitar 49 point. Mulai dari yang namanya orang yang tidak memahami tentang pasar modal, apalagi orang-orang yang memang bermain pada wilayah pasar modal dan atau memiliki uang banyak dalam bentuk dolar atau apapun, tentu saja pertanyaan Pak Menteri Keuangan tidak seharusnya kepada anda karena menurut Pasal 7 dan 8 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini adalah tugas BI dalam hal mata uang tetapi saya setuju dengan Saudara Menko Ekkuin Saudara Darmin Nasution mengatakan tidak lagi kita berada hanya pada sektor keuangan, maka kemudian saya ingin memposisikan diri hari ini Partai NasDem adalah partai pendukung pemerintah tetapi tentu saja kami tidak bisa diam melihat hal ini. Ada jawaban yang sangat mudah seperti yang pernah Saudara Menteri Keuangan yang juga sampaikan di publik bahwa ini efek dari Yuan kami memahami bapak-ibu sekalian. Tidak terlalu cukup susah untuk memahami itu karena media juga memberitakannya. Hari ini Inggris setidaknya kehilangan 1300 triliun, tetapi persoalannya adalah kami kebingungan. Saya menggunakan kata kami sebagai representasi dari rakyat Indonesia bersama 560 yang ada diruangan ini. Pada posisi mana sebenarnya kita harus berdiri, ada bagian dimana optimistik terbangun tapi pada realitas yang lain sebenarnya kita sungguh-sungguh dalam permasalahan. Saya menyukai pernyataan seorang direktur utama sebuah bank besar, hari ini mengatakan kita baik-baik saja, tetapi pada sisi yang lain juga kemudian kita mendengarkan pesimisnya. Saudara Menteri Keuangan, apa yang anda sampaikan tadi sungguh-sungguh menyenangkan bagi kami, tetapi saya ingin mengingatkan UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang APBN P dipatok harga nilai tukar kita Rp.12.500,-, saya mengingatkan kembali pernyataan saya pada tahap awal, hari ini telah mencapai Rp.14.000,- lebih pada 49 point, maka untuk itu kemudian sebenarnya Pimpinan dan Saudara Pemerintah, inilah saat untuk menentukan diri anda sebagai profesional seperti yang selalu didengung-dengungkan banyak orang, kami menagih itu. Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada anda, dimana profesional anda?. Kami tidak melihat akan dibentuk sebuah lembaga crisis center oke, tetapi pada saat yang bersamaan kami mendengarkan bahwa BUMN akan buyback saham senilai 10 triliun. Belum ada kepastian dari kementerian-</p>	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	<p>kementerian pada sisi yang bersamaan kita mendengarkan optimisme tetapi kita juga tahu bahwa perbankan kita juga sudah membuat skenario-skenario kalau harga Rp.14.000,- bagaimana? Rp.15.000,- bagaimana? Saya dengar tadi malam Singapura sudah menetapkan harga Rp.17.000,- untuk <i>hedging</i> selama 2 bulan kedepan, maka kemudian kepada Menteri Keuangan mohon segeralah berkoordinasi, kami tentu saja setuju dan menyukai ada langkah-langkah, katakanlah sesuai untuk yuan dan yen, tetapi kemudian apakah dia mau diperlakukan seperti itu. kami ingin mendengarkan terobosan disini sebenarnya. Kementerian ini melakukan apa?, kementerian ini melakukan apa?, kemudian koordinasi disitu. Belum-belum Menteri Ekkuin yang lama dengan baru sudah berbeda, dinyatakan ke publik. Berhentilah untuk berkelahi di publik. Partai-partai pemerintah diruangan ini digebukin setiap hari pak, untungnya partai-partai yang sebelumnya berbeda dengan kami, sudah bersatu dengan kami, alhamdulillah, tetapi kemudian anda tunjukkan kepada publik dimana anda? Saya yakin anda sudah melakukan tetapi tidak terbaca dengan cukup kuat dipublik. Pimpinan, saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian, pemerintah siapapun anda, disini saatnya untuk menunjukan bahwa kita dalam krisis, diakui bahwa itu dengan langkah yang terukur jangan kemudian membuat kita pada wilayah keguncangan-keguncangan informasi, Wabillahit taufik walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p>	
<p>H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-P GOLKAR/DAPIL: JATIM II</p>	<p>Saya ingin memberikan interupsi apa yang disampaikan oleh Sahabat saya Saudara Akbar Faizal. Saya ingin menyampaikan bahwa Komisi XI sudah memanggil Menteri Keuangan, Gubernur BI, Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan klarifikasi terhadap situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Kita tidak perlu memberikan komentar-komentar politik yang terlalu berlebihan, karena berilah ruang dan kesempatan kepada pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia sebagai otoritas bidang moneter untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan mereka memahami. Kita ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, kita mengerti dan situasi saat ini butuh sebuah kerjasama yang kuat, kerjasama yang baik dari semua pihak, baik itu pemerintah, legislatif, maupun siapapun untuk bersama-sama menghadapi situasi ini bersama-sama. Ada situasi yang tidak bisa kita kontrol sendiri, ada situasi yang tidak bisa kendalikan sendiri, ada situasi yang kita butuh kebersamaan, kegotongroyongan sebagai anak bangsa untuk menyelesaikan bahwa ini bukan masalah pemerintah semata, ini adalah masalah bangsa Indonesia. Saya ingin</p>	

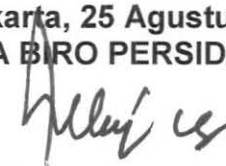
Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	<p>mengingatkan janganlah kemudian situasi yang ada saat ini kita buat menjadi sebuah peristiwa dan kegaduhan politik. Dan saya ingin memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah, Gubernur Bank Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, kerja dan kerja mereka harus kita hargai dan mereka bisa menunjukkan semangat kerjanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.</p>	
<p>Ir. BAMBANG HARYO SOEKARTONO A-364/F-P GERINDRA/DAPIL: JATIM I</p>	<p>Yang terhormat Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang hadir pada hari ini, juga Pak Menteri Keuangan,</p> <p>Dengan adanya keterpurukan mata uang kita terhadap dollar yang luar biasa ini pak, persepsi daripada masyarakat yang kami sering mendengar sampai ketinggian bawah, itu adalah seakan-akan Anggota DPR ini yang menyebabkan rupiah itu terpuruk tajam, jadi kita dianggap menghambat kinerja daripada pemerintah, padahal pak, mulai dari kebetulan saya di Komisi VI ataupun di Banggar kami bekerja sampai pagi hari, bahkan hampir setiap hari sampai jam 12, jam 1 bahkan sampai jam 5 pagi bersama-sama dengan Pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses dari pada anggaran itu sendiri, baik rancangan anggaran itu sendiri maupun anggaran yang ada. Jadi DPR sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah. Jadi ditegaskan lagi supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa DPR ini sudah bersatu baik tidak ada KIH, tidak ada KMP, sangat-sangat mendukung pemerintah didalam proses percepatan daripada anggaran itu, yang diharapkan pemerintah bisa mempercepat daripada proses penyerapan anggaran itu sendiri. Jadi itu yang kami sampaikan dan membuat suatu iklim usaha swasta semaksimal mungkin cukup baik sehingga semua bisa berkembang dengan baik di Indonesia dan diharapkan nilai kurs mata uang ini, yang asing ini bisa turun terhadap rupiah, terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p>	
<p>SAID ABDULLAH A-204/F-PDI PERJUANGAN DAPIL: JATIM XI</p>	<p>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</p> <p>Terima kasih Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang sungguh-sungguh saya hormati dan hari ini ada pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Saudara Pak Misbakhun, sudah saatnya kita sesungguhnya bahwa baik DPR dengan segala dinamikanya melihat kondisi perekonomian nasional kita, supaya bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah untuk rakyat, DPR untuk rakyat, kalau satu sikap yang kita ambil untuk kepentingan bangsa, saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Misbakhun menjadi cita-cita kita semua, bahwa kebetulan PDI Perjuangan sama visinya dengan Golkar, alhamdulillah. Insyallah dengan kita semuanya itulah kira-kira</p>	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	yang perlu kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan dan kawan-kawan Dewan, bahwa ini adalah periode yang sungguh menjadi ujian bagi kita semua untuk mendewasakan diri agar, komitmen kerakyatan kita akan tumbuh sama dengan komitmen pemerintah. Terima kasih.	
RUHUT SITOMPUL, S.H A-399/F-PD/DAPIL: SUMUT I	Dalam pembicaraan kita di Paripurna ini, saya dari Fraksi Partai Demokrat hanya dapat mengatakan jangan ada dusta diantara kita, semoga apa yang dibicarakan itu kata hati, bukan lain dimulut lain dihati, hanya itu pesan kami, mari kita dengan semangat kebersamaan antara Pemerintah dan DPR berpegangan tangan, kita tahu betul apa sekarang yang dialami oleh rakyat Indonesia, masalah ekonomi merupakan tantangan yang paling berat, karena itu kita saling isi mengisi, terima kasih Pimpinan.	
JOHNNY G PLATE, S.E A-27/F-P NasDem/DAPIL: NTT I	Assalamu'alaikum Wr.Wb Kami menggarisbawahi bahwa sinergi nasional dari semua komponen bangsa kita, pemerintah, eksekutif, legislatif, kelompok sosial, sosial politik, segenap warga bangsa kita untuk melihat bahwa saat ini bangsa kita sedang mengalami tekanan perekonomian yang luar biasa besarnya untuk itu maka segenap kebijakan kita haruslah bersatu padu untuk menjaga ketahanan ekonomi kita untuk membantu agar kelemahan rupiah tidak terus berlanjut , kami menggaris bawahi itu dan minta agar pembicaraan ini adalah betul-betul keputusan dan keberpihakan kepada bangsa dan negara bukan lagi untuk keberpihakan kelompok dan tidak ada menggunting dalam lipatan, terima kasih.	
MARUARAR SIRAIT A-164/F-PDI PERJUANGAN DAPIL: JABAR IX	Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak Menteri Keuangan yang kami hormati beserta jajaran teman-teman DPR, Assalamu'alaikum Wr.Wb Salam sejahtera untuk kita semua, Pertama, apa yang terjadi dalam Rapat Paripurna ini menunjukkan menurut kami, DPR sudah mentransformasi dirinya menjadi betul-betul negarawan karena kita juga memahami bahwa kondisi hari ini, sejujurnya ini adalah kondisi yang cukup berat, tetapi kalau dikatakan krisis ini belum krisis, saya berani mengatakan dengan mempertaruhkan apapun ini adalah kondisi yang cukup berat tetapi kalau dikatakan krisis ini pasti belum krisis, kenapa? saya pikir ini, kita juga tahu bahwa cadangan devisa kita juga masih cukup kuat, kita baru mengadakan suatu pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia, kita juga memberikan cadangan devisa cukup kuat,	KETUA RAPAT : Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Pak Akbar Faizal, Pak Misbakhun, Pak Bambang Haryo, Pak Said Abdullah, Pak Ruhut dan Pak Ara, bahwa apa yang menjadi pembahasan topik kita dalam interupsi di Rapat Paripurna tentunya tadi malam perlu kami sampaikan juga didalam forum yang terhormat ini, Pimpinan DPR dan seluruh Pimpinan Banggar

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	<p>kemudian juga kita tahu bagaimana regulator kita BI, OJK dan Pemerintah juga memiliki sinergi yang luar biasa baik dan harmonis selama ini, Yang ketiga, saya juga menghimbau ada banyak undang-undang yang menjadi prioritas pada saat ini di DPR, tetapi ijin kami dengan situasi sekarang mengusulkan Undang-Undang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan sebagai prioritas untuk dibahas dan bisa diputuskan oleh DPR dan Pemerintah saat ini kenapa? Jangan sampai lagi terulang kalau ada problem-problem kedepan dengan situasi yang mendesak tidak ada protokol yang sifatnya nomor satu harus legal, kedua harus akurat, yang ketiga juga harus cepat dan kita sampai sekarang itu belum memiliki protokol secara legal. Jadi kami sangat mengharapkan bagaimana iklim usaha juga bisa dibangun optimisme dan kepastian, kita juga tahu pengambil keputusan juga memerlukan rasa aman dan kepastian dalam mengambil suatu keputusan ditengah situasi seperti ini. Jadi saya berharap DPR bisa mempertimbangkan dengan Pemerintah, dengan situasi hari ini, apa yang menjadi prioritas kita, dari segi undang-undang saya berharap itu, dari segi apa yang menjadi rencana Pemerintah dalam APBN TA 2016 tolong utamakan untuk meningkatkan daya beli rakyat dari segala macam bentuk rencana dan strategi yang akan dilakukan Pemerintah, yang pasti daya beli rakyat terutama rakyat kecil dan rakyat menengah, glontorkanlah program-program yang langsung kepada mereka dan bisa meningkat daya beli mereka, pilih jangan uang kita sudah terbatas, jangan sampai tidak tepat sasaran, berikan kepada UKM, koperasi yang siap menggerakkan didaerah. Saya sangat menyarankan data base kita diperkuat dengan baik, uang kita sudah terbatas, jangan sampai juga sampai ketempat yang tidak sasaran. Terima kasih Pimpinan, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p>	<p>sudah mengadakan Rapat Konsultasi dengan Menteri Keuangan dan beserta seluruh jajarannya, dari rapat jam 18.30 WIB sampai dengan jam 20.30 WIB, dan tentunya ini nanti ada beberapa hal bahwa kaitan dengan situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini sudah menjadi permasalahan kita bersama, sudah tidak ada istilah ini masalah Pemerintah atau masalah DPR, tapi masalah untuk kita hadapi bersama-sama, untuk kita carikan solusi. Itulah salah satu dari hasil rapat konsultasi tadi malam dan tentunya kita akan segera menyampaikan kepada Pemerintah, mengusulkan kepada Presiden untuk segera dilaksanakan intensitas rapat ataupun komunikasi dengan mitra kerja terkait dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk dicarikan langkah-langkah tadi disampaikan oleh Pak Ara, protokol krisis memang jadi salah satu hal yang menjadi kebijakan hukum kita pada saat kita membahas didalam RUU JPSK, untuk itu kami mohon semua dari seluruh Anggota DPR yang hadir yang terhormat pada</p>

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
		kesempatan kali ini. Memberikan kesempatan kepada Komisi XI membahas prioritas dalam kaitan dalam UU JPSK itu menjadi salah satu solusi pada saat kita menghadapi langkah-langkah yang tentunya harapan kita cepat terselesaikan pada kesempatan kali ini.

Jakarta, 25 Agustus 2015
KEPALA BIRO PERSIDANGAN,



Drs. HELMIZAR
NIP. 196407191991031001